

Berfungsikah Pendidikan Politik di Mesin Partai Politik ?

Deni Zein Tarsidi
PPKn, FKIP Universitas Pasundan
denizein@unpas.ac.id

ABSTRACT

One function of political parties is Political Education for cadres and society. But so far Political Parties often "orbit" their cadres to compete in the general election arena both locally and nationally which results in a lack of political literacy. This research is about to answer the political education program for cadres of political parties. This study uses a qualitative approach with a case study method. The locus of this research is the cadres of political parties and members of DPRD Kab. Bandung. Data collection techniques used to obtain data are observation, interviews and documentation. While the data analysis technique used is by triangulating data through data reduction, data presentation and conclusion / verification. In this study, the results show that Political Education in Political Parties is made directly by the Central Leadership Council of Political Parties and there are several levels in the implementation of political education.

Keywords: *Political Education, Political Parties.*

ABSTRAK

Salah satu fungsi partai politik adalah Pendidikan Politik bagi kader dan masyarakat. Akan tetapi selama ini Partai Politik seringkali “mengorbit” kadernya untuk berlaga di kancah pemilihan umum baik tingkat lokal maupun nasional yang mengakibatkan kurangnya literasi akan politik. Penelitian ini hendak menjawab tentang program pendidikan politik bagi kader partai politik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Locus penelitian ini yaitu kader partai politik dan anggota DPRD Kab. Bandung. Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan yaitu dengan triangulasi data melalui reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Dalam penelitian ini diperoleh hasil bahwa Pendidikan Politik di Partai Politik kurikulumnya dibuat langsung oleh Dewan Pimpinan Pusat dari Partai Politik dan ada beberapa tingkatan dalam pelaksanaan pendidikan politiknya.

Kata Kunci: **Pendidikan Politik, Partai Politik.**

PENDAHULUAN

Partai politik memiliki peran yang sangat vital dalam proses pendidikan politik. Partai politik sebagai pemain di barisan terdepan berkewajiban untuk melakukan pendidikan politik bagi rakyat. Sedangkan pendidikan politik disini bukan hanya dimaknai sebagai proses sepihak ketika partai politik memobilisasi dan memanipulasi warga/ masyarakat untuk

menerima nilai, norma, maupun simbol yang dianggapnya ideal dan baik, seperti yang terjadi di negara-negara yang menganut sistem politik totaliter.

Pendidikan politik berfungsi untuk memberikan isi dan arah serta pengertian kepada proses penghayatan nilai-nilai yang sedang berlangsung. Ini berarti bahwa pendidikan politik menekankan kepada usaha pemahaman tentang nilai-nilai yang etis normatif, yaitu dengan menanamkan

nilai-nilai dan norma-norma yang merupakan landasan dan motivasi bangsa Indonesia serta dasar untuk membina dan mengembangkan diri guna ikut serta berpartisipasi dalam kehidupan pembangunan bangsa dan negara.

Pendidikan politik dalam UU RI No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik pada Bab I Pasal 1 ayat (4) menyebutkan: “Pendidikan politik adalah proses pembelajaran dan pemahaman tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara”. Jadi Pendidikan Politik diharapkan dapat membentuk warga negara yang berkepribadian utuh, berketerampilan, sekaligus juga berkesadaran yang tinggi sebagai warga negara yang baik (*good citizen*), sadar akan hak dan kewajiban serta memiliki tanggung jawab yang dilandasi oleh nilai-nilai yang berlaku dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Proses pencapaian tujuan pendidikan politik tersebut tidak dapat dilihat secara langsung namun memerlukan waktu yang cukup lama, hal ini disebabkan karena pendidikan politik berhubungan dengan aspek sikap dan perilaku seseorang.

Menurut Pemerintah Republik Indonesia dalam desain induk pembangunan karakter bangsa tahun 2010-2025 (Pemerintah RI, 2010, h.6) “partai politik melalui pendidikan politik memiliki peran dan nilai strategis dalam pembangunan karakter bangsa karena semua partai politik memiliki dasar yang mengarah pada terwujudnya upaya demokratisasi yang bermartabat”.

Dengan kerangka berpikir yang demikian, maka partai politik yang oleh Antonio Gramsci dikategorikan sebagai salah satu organisasi masyarakat sipil (dalam Roger Simon, 1999, h. 20), diharapkan dapat melaksanakan fungsinya sebagai *Instrument Of Political Education* dengan baik dan benar, sesuai amanat yang tertuang dalam pasal 11 huruf a UU No. 2 Tahun 2011, tentang Partai Politik menyebutkan: “partai politik berfungsi sebagai sarana

pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.”

Fungsi pendidikan politik sangat penting sebab pendidikan politik meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang kehidupan politik yang pada gilirannya akan mendorong timbulnya kesadaran politik secara maksimal dalam suatu sistem politik. Merujuk pada beberapa pengertian pendidikan politik yang telah disebutkan sebelumnya, maka pendidikan politik mempunyai dua fungsi utama, yaitu :

- a. fungsi pendidikan politik adalah untuk mengubah dan membentuk tata perilaku seseorang agar sesuai dengan tujuan politik yang dapat menjadikan setiap individu sebagai partisipan politik yang bertanggung jawab.
- b. fungsi pendidikan politik dalam arti yang lebih luas untuk membentuk suatu tatanan masyarakat yang sesuai dengan tuntutan politik yang ingin diterapkan.

Inti dari pendidikan politik adalah mengenai bagaimana rakyat direkrut dan disosialisasikan. Jadi, fungsi dari pendidikan politik adalah untuk menjelaskan proses perekrutan dan upaya sosialisasi kepada rakyat untuk mengerti mengenai peranannya dalam sistem politik serta agar dapat memiliki orientasi kepada sistem politik.

Fungsi yang disampaikan di atas lebih menonjolkan fungsi pendidikan politik dalam mengubah tatanan masyarakat yang ada menjadi lebih baik dan lebih mendukung tercapainya proses demokrasi. Sedangkan fungsi pendidikan politik bagi individu antara lain adalah:

- 1) Peningkatan kemampuan individual supaya setiap orang mampu berpacu dalam lalu lintas kemasyarakatan yang menjadi semakin padat penuh sesak dan terpolusi oleh dampak bermacam-macam penyakit sosial dan kedurjanaaan.

- 2) Disamping mengenai kekuasaan, memahami mekanismenya, ikut mengendalikan dan mengontrol pelaksanaan kekuasaan di tengah masyarakat.

Fungsi pendidikan politik bagi individu yang tertera di atas tidak hanya mengubah individu tapi juga membentuk individu yang baru. Dalam artian bahwa seseorang individu dengan melalui pendidikan politik tidak hanya memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang politik tapi juga mempunyai kesadaran dan sensitifitas dalam berpolitik yang direalisasikan dalam bentuk perbuatan yaitu dengan ikut berpartisipasi atau ditunjukkan dengan sikap dan perilaku politif yang lebih luas dalam usahanya untuk mencapai tujuan politik.

Proses memasyarakatkan atau sosialisasi politik harus merata kedalam segenap lapisan masyarakat secara vertikal dan horizontal. Dengan demikian, pengetahuan politik tidak lagi merupakan monopoli kaum elit saja, walaupun kaum ini merupakan elemen penggerak yang vital. Arah pendidikan masyarakat guna meningkatkan daya pikir dan daya tanggapnya dalam masalah politik sangat erat hubungannya dengan kebudayaan dan orientasi politik.

Menurut Almond dan Coleman (Rush, 2005, h. 2) fungsi pendidikan politik adalah sebagai berikut :

The existence in all political systems of methods of political recruitment and training led us to the question, how are people recruited to and socialized into political roles and orientations in different political system ? or the recruitment and socialization function. Artinya, terdapat metode perekrutan dan latihan politik dalam setiap sistem politik menyebabkan kita bertanya, bagaimanakah rakyat direkrut dan dimasyarakatkan ke arah peranan dan orientasi politik dalam sistem politik yang berbeda-beda? Atau fungsi perekrutan dan sosialisasi

Jadi berdasarkan analisis diatas maka menurut penulis fungsi dari pendidikan politik :

- 1) Bagi kader partai politik, pendidikan politik sangat dibutuhkan karena berfungsi untuk menyiapkan kader-kader partai politik agar menjadi wakil-wakil rakyat yang berkualitas dan pro terhadap kesejahteraan rakyat serta tidak mementingkan diri sendiri ataupun golongannya. Seorang wakil rakyat yang berkualitas adalah seseorang yang memikirkan bagaimana caranya agar dapat memajukan bangsa dan negaranya.
- 2) Bagi masyarakat umumnya, pendidikan politik berfungsi agar dapat mencerdaskan rakyat dalam hal perpolitikan. Dengan adanya pendidikan politik maka rakyat akan mempunyai kesadaran berpartisipasi yang tinggi dalam pemilu sehingga rakyat tidak perlu “diiming-imingi” sesuatu untuk memilih salah satu calon wakil rakyat, akan tetapi dengan pemikiran yang bernalar tinggi, rakyat dapat memilih wakil-wakilnya yang berkopeten dan berkualitas untuk duduk di lembaga eksekutif maupun legislatif untuk memperjuangkan hak-hak semua lapisan masyarakat.

METODE

Dalam penelitian ini dilakukan pendekatan kualitatif, yang bertujuan memahami suatu situasi sosial, peristiwa, peran, interaksi dan kelompok. Menurut John W. Creswell, ahli psikologi pendidikan dari *University of Nebraska, Lincoln* (1994, h. 150) “Metode Pendekatan Kualitatif merupakan sebuah proses investigasi”. Penelitian ini menggunakan desain studi kasus dalam arti penelitian ini difokuskan pada satu fenomena saja yang dipilih dan ingin dipahami secara mendalam, dengan mengabaikan fenomena-fenemona lain. Menurut Nasution (1996, h. 11) mengemukakan bahwa dalam penelitian

kualitatif sering berupa studi kasus. Sedangkan menurut Arikunto (1996, h. 129) “penelitian studi kasus adalah penelitian yang dilakukan secara intensif, terinci, dan mendalam terhadap suatu organisasi, lembaga atau gejala tertentu”. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini berupa: 1) observasi, 2) wawancara dan 3) studi dokumentasi. Objek dalam penelitian ini adalah Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kab. Bandung (DPC PDI-P Kab. Bandung).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Partai politik sebagai salah satu organisasi yang sangat berperan dalam mencetak pemimpin yang berkualitas dan berwawasan nasionalisme Indonesia. Hal ini senada dengan bunyi UU No. 2 Tahun 2011 pasal 1 ayat (1) bahwa yang dimaksud dengan partai politik adalah:

Organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan Negara serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

Dari pengertian definisi diatas terlihat bahwa partai politik sebagai wadah atau organisasi yang berjuang untuk memperjuangkan kepentingan bangsa dan negaranya yang berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945 demi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Partai politik sebagai organisasi nasional harus bisa mempersiapkan calon pemimpin bangsa yang berkualitas, pemimpin yang tidak hanya berorientasi pada kepentingan partai politik yang mengusungnya, akan tetapi ketika menjadi pemimpin di daerah atau nasional, ia otomatis menjadi

pemimpin untuk semua orang, dan ketika ia menjadi wakil rakyat yang duduk di DPR-RI atau DPRD yang harus menjadi wakil rakyat, minimal dapat menjesahterakan daerah pemilihannya karena untuk memajukan bangsa dan negaranya dimulai dari hal terkecil. Dalam menciptakan seorang pemimpin atau wakil rakyat yang pro terhadap kebijakan untuk mensejahterakan rakyat, perlu sebuah proses dalam penciptaan pemimpin atau wakil rakyat yang berkualitas tersebut. Pemimpin atau wakil rakyat yang berkualitas tidak lahir begitu saja, melainkan dibalik semua pemimpin atau wakil rakyat tersebut ada proses di dalamnya. Pemimpin atau wakil rakyat yang berkualitas dan memiliki kompetensi salah satunya indikatornya di dapat dari proses pendidikan politik baik yang di dapatkan dari pendidikan formal maupun dari pendidikan non-formal yang mampu membentuk jiwa dan karakter pemimpin yang sesuai dengan nilai-nilai keindonesiaan. Pendidikan politik yang didapatkan oleh seorang calon pemimpin bangsa diantaranya didapatkan melalui pendidikan politik di partai politik. Hal ini senada dengan isi pasal 11 ayat (1) huruf a bahwa partai politik berfungsi sebagai “sarana pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara”. Maka dalam struktur dan sistem politik, organisasi partai politiklah yang paling bertanggung jawab melahirkan pemimpin-pemimpin yang berkualitas. Untuk dapat melakukan tugas ini, dalam organisasi partai politik perlu dikembangkan pendidikan politik. Hal ini senada dengan pendapat yang dikemukakan oleh Haines (dalam Idrus Affandi, 1993, h. 5) bahwa :

Pendidikan politik adalah bagaimana mengembangkan keinginan professional dalam politik dan mengutamakan yang mengarah kepada tanggungjawab politik, yang dalam waktu yang sama berusaha

memberikan kepada mereka pengetahuan yang penting dan keterampilan untuk melaksanakan tanggungjawab.

Pendidikan politik ini sangat penting mengingat perlu adanya *transfer* pengetahuan politik, tidak hanya yang terkait dengan permasalahan bangsa dan negara. Tapi bagaimana pendidikan politik itu dapat memberikan pemahaman dan penghayatan terhadap nilai-nilai asli bangsa, kepada setiap warga negara terutama kader partai politik yang merupakan calon pemangku jabatan politik *publik*. Maka perlu adanya suatu program pendidikan politik yang sebelumnya telah terprogram, mulai dari waktu pelaksanaan program pendidikan politik, kurikulum pendidikan politik, metode pendidikan politik sampai pada evaluasi pendidikan politik tersebut.

Pendidikan politik secara umum merupakan suatu bentuk pembinaan terhadap seseorang agar dapat memahami nilai-nilai yang terkandung dalam sistem politik yang ideal yang hendak dibangun. Pendidikan politik tidak hanya berupa proses dalam rangka menambah pengetahuan saja, tetapi juga bagaimana seseorang melalui pendidikan politik dapat bertindak secara akal pikiran. Seperti yang dikemukakan oleh Alfian (1981, h. 235) yang mengatakan bahwa “Pendidikan politik dapat diartikan sebagai usaha yang sadar untuk mengubah proses sosialisasi politik masyarakat sehingga mereka memahami dan menghayati betul nilai-nilai yang terkandung dalam sistem politik yang ideal yang hendak dibangun”.

Pendidikan politik yang dijalankan oleh DPC PDI-Perjuangan Kab. Bandung selain bertujuan untuk membuat seseorang menjadi melek politik juga bertujuan untuk memberi latihan, ajaran serta bimbingan untuk mengembangkan kapasitas dan potensi diri, sehingga masyarakat dan kader partai khususnya dapat memiliki kesadaran berdemokrasi dalam kehidupan bernegara.

DPC PDI-Perjuangan Kab. Bandung sudah menjalankan salah satu fungsi partai politik sebagai sarana pendidikan politik dengan cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari pendidikan politik yang dijalankan oleh partai tersebut, dimana salah satu tujuan pendidikan politiknya adalah memberi latihan, ajaran serta bimbingan untuk mengembangkan kapasitas dan potensi diri, sehingga masyarakat dan kader partai pada khususnya dapat memiliki kesadaran berdemokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal ini senada dengan pandangan dari Sumantri dan Affandi (1982, h. 126) yang mengatakan bahwa: “maksud diselenggarakan pendidikan politik pada dasarnya adalah untuk memberikan pedoman bagi generasi muda Indonesia guna meningkatkan kesadaran kehidupan berbangsa dan bernegara sejalan dengan arah dan cita-cita bangsa Indonesia”.

Pada dasarnya pendidikan politik bertujuan untuk menanamkan sejumlah nilai kepada kader yang telah direkrut sebelumnya, agar kader tersebut dapat terus mempertahankan nilai-nilai yang telah ada. Pendidikan politik merupakan salah satu hal yang paling penting dalam sebuah organisasi politik. Sebuah partai politik hanya akan dapat bertahan dari berbagai dinamika dan tantangan zaman jika kadernya mempunyai kualitas dan kapabilitas yang baik yang didapatkan dari pendidikan politik di partai politik.

Program pendidikan politik yang dilaksanakan oleh DPC PDI-Perjuangan Kab. Bandung merupakan program pendidikan politik yang kurikulumnya dari DPP masing-masing partai tersebut. Ada beberapa jenjang dalam pelaksanaan pendidikan politik, baik yang dilaksanakan oleh PDI-Perjuangan, yaitu:

- 1) Jenjang pertama, pendidikan politik untuk kader Pratama, sarannya ketua PAC. Minimal pelaksanaan setahun sekali.
- 2) Jenjang kedua, pendidikan politik untuk kader madya sarannya pengurus DPC. Minimal pelaksanaan setahun sekali

- 3) Jenjang ketiga, pendidikan politik untuk kader utama, sasarannya guru kader DPD,DPC, pemangku jabatan politik. Minimal pelaksanaan setahun sekali.

PDI-Perjuangan juga memberikan pendidikan kepada masyarakat karena salah satu metode dalam pendidikan politik di PDI-Perjuangan adalah terjun langsung ke masyarakat, menanyakan permasalahan yang dihadapi masyarakat sehingga masyarakat pun tahu dan mulai tertarik dengan PDI-Perjuangan. Hal ini senada dengan salah satu tujuan dari pendidikan politik sebagaimana dikemukakan oleh Amril (2004, h. 104) yaitu:

. . . mampu mengadakan analisis mengenai konflik-konflik politik yang aktual, lalu berusaha ikut memecahkan; jadi terdapat partisipasi politik. Sebab, urusan politik itu jelas membawa dampak kebaikan atau dampak keburukan kepada rakyat banyak. Karena itu rakyat juga sangat berkepentingan dengan urusan politik yang menyangkut mati hidupnya diri sendiri dan keselamatan rakyat pada umumnya.

Dalam hal ini pendidikan politik diarahkan pada pembentukan warga negara yang memiliki sikap dan analisis kritis terhadap berbagai masalah sosial politik di lingkungannya. Sehingga diharapkan warga negara ikut serta dalam memecahkan masalah yang dihadapi dan memiliki kesadaran politik yang berimbang pada partisipasi politik aktif. Pendidikan politik menjadi sebuah pemahaman dalam setiap warga negara untuk dihayati sehingga membentuk perilaku politik atau melekat politik.

KESIMPULAN

Pendidikan politik yang dilaksanakan oleh DPC PDI-P Kab. Bandung merupakan salah satu implementasi fungsi partai politik yang diamanatkan oleh UU RI No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik. Pembuatan kurikulum pendidikan politik di DPC PDI-P merupakan penjabaran dari kurikulum pendidikan politik yang dirancang oleh DPP (Dewan Pimpinan Pusat) PDI-P, yang kurikulum pendidikan politiknya khusus bagi kader PDI-P saja. Sedangkan pendidikan politik yang diberikan oleh partai kepada masyarakat kurang berfungsi dengan baik, karena tidak terstruktur kurikulu pendidikan politik bagi masyarakat atau non kader. Selain itu, dalam pelaksanaan pendidikan politik bagi kader tingkat DPC tidak dapat dirasakan oleh semua kader, karena hanya hanya pimpinan DPC saja yang mendapatkan pendidikan politik yang terstruktur. Maka untuk mensiasati permasalahan tersebut, DPC PDI-P Kab. Bandung memberikan pendidikan politik bagi kader yang tidak mendapatkan pendidikan politik secara terstruktur melalui mengobrol bersama dengan kader yang bersangkutan sambil minum kopi atau sebagainya disertai tentang pembahasan mengenai politik.

DAFTAR PUSTAKA

- Affandi, Idrus. (1996). *Kepeloporan Organisasi Kemasyarakatan Pemuda dalam Pendidikan Politik*. Disertasi Pasca Sarjana IKIP Bandung: Tidak diterbitkan.
- _____ (1993). *Analisa Buku Political Education R. Brownhill dan Patricia Smart. Makalah Lab. PPKN IKIP Bandung* : Tidak diterbitkan
- Alfian. (1983). *Pemikiran dan Perubahan politik Indonesia*. Jakarta : PT. Gramedia
- Arikunto, Suharsimi. (2006). *Prosedur Penelitian*. Jakarta : Rineka Cipta.

- _____ (2007). *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Nasution S. (1996), *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : Tarsito
- Pemerintah RI. (2010). *Desain Induk Pembangunan Karakter Bangsa Tahun 2010-2025*. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik
- Rush, M dan Philip Althoff. (2001). *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta: Rajawali Press.